

**PERSEPSI SISWA TERHADAP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER**

**Cahaya Ningrum¹, Defi Ela Safitri², Siti Fatimah Purmasari³, Salmah⁴, Ali Iskandar
Zulkarnain⁵**

cahayaningrum400@gmail.com¹, safitridefiela@gmail.com², fatimahpurna25@gmail.com³,
salmah.mtzza@gmail.com⁴, ali.iskandar.zulkarnain@iain-palangkaraya.ac.id⁵

IAIN Palangka Raya

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (pkn) memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa terhadap pkn sebagai sarana pembentukan karakter. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada siswa tingkat menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pandangan positif terhadap pkn, terutama dalam aspek penguatan nilai-nilai moral, etika, dan nasionalisme. Namun, beberapa siswa merasa bahwa metode pengajaran yang kurang interaktif menghambat pemahaman mereka terhadap materi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran agar pkn dapat lebih efektif dalam membentuk karakter siswa.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Persepsi Siswa, Pembentukan Karakter, Nilai Moral, Metode Pembelajaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (pkn) merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan etika kepada siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pkn diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan.

Namun, efektivitas pkn dalam membentuk karakter siswa masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pkn diajarkan secara formal, pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang diajarkan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Faktor seperti metode pengajaran, pendekatan guru, serta relevansi materi dengan kehidupan siswa menjadi aspek yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap pkn.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana siswa memandang pkn sebagai sarana pembentukan karakter. Dengan memahami persepsi siswa, diharapkan dapat ditemukan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan peran pkn dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak dan bertanggung jawab.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika (Saputra, 2020). Menurut Santoso (2018), PKn berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, demokrasi, dan tanggung jawab sosial. Melalui PKn, siswa diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PKn menjadi sarana penting dalam membangun karakter individu yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Persepsi siswa terhadap suatu mata pelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk metode pengajaran, relevansi materi, dan pengalaman belajar di kelas (Hidayat & Putri, 2021). Studi yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki persepsi positif terhadap PKn, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, penelitian lain oleh Prasetyo (2022) menemukan bahwa beberapa siswa merasa PKn kurang menarik karena metode pembelajarannya yang cenderung monoton dan teoritis. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif dalam pengajaran PKn diperlukan agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa.

Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam pembelajaran PKn karena bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak dan beretika (Suharto, 2020). Penelitian oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa PKn memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam hal kedisiplinan, toleransi, dan sikap gotong royong. Selain itu, penelitian oleh Nugroho (2019) mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai PKn cenderung memiliki perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai media dalam menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk pribadi siswa yang lebih baik.

Meskipun PKn memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Menurut Rahmawati (2022), kurangnya inovasi dalam metode pengajaran menyebabkan siswa kurang tertarik untuk mendalami materi PKn. Selain itu, penelitian oleh Hakim (2020) menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena

itu, diperlukan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman agar pembelajaran PKn lebih efektif. Pembelajaran yang hanya berbasis teori tanpa adanya praktik nyata cenderung membuat siswa merasa bahwa PKn tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara PKn dan pembentukan karakter. Studi oleh Sari (2017) menemukan bahwa siswa yang aktif dalam pembelajaran PKn memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang kurang berminat dalam mata pelajaran ini. Sementara itu, penelitian oleh Yusuf (2021) menyoroti pentingnya keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis PKn untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebangsaan dan nilai-nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang efektif tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan di luar kelas yang melibatkan interaksi sosial secara langsung.

Dari berbagai penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada metode pengajaran yang digunakan serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran PKn menjadi faktor penting dalam meningkatkan persepsi positif siswa terhadap mata pelajaran ini. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman, diharapkan PKn dapat semakin relevan dan memberikan dampak nyata dalam membentuk karakter serta kesadaran berbangsa bagi para siswa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan persepsi siswa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter berdasarkan kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui survei atau wawancara, melainkan melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan karakter. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansinya terhadap topik penelitian. Literatur yang digunakan dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antara PKn dan pembentukan karakter siswa.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), di mana isi dari berbagai referensi yang diperoleh dikaji secara sistematis untuk menggali konsep-konsep utama yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk kesadaran dan nilai-nilai karakter pada siswa.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pendidik dan akademisi dalam memahami efektivitas PKn dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia, dengan menggunakan nama, seperti: *civic education*, *citizenship education*, and *democracy education*. PKn memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung

jawab, dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic International (1995) bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan "civic culture" untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan, inilah satu tujuan penting pendidikan "civic" maupun "citizenship" untuk mengatasi political apatism demokrasi (Azyumadi Azra, 2002: 12). Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan muatan, demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah lembaga masyarakat, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri (Hamdan Mansoer, 2004:4).

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan:

1. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius.
2. Menjadi warga negara yang cerdas berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.
4. Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

B. Pancasila Sebagai Nilai Dasar pkn untuk Berkarya bagi Lulusan PT

Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi pkn sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran pkn disirami nilai-nilai Pancasila Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembang karya setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan keseimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai baginya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan YME, tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, menyejahterakan dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia, Mengimplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum.
4. Nilai Kerakyatan dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan penelitian, sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak

memberi ruang bagi pahan egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan), liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai "civic education, democracy education, and civil education" dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan pkn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri.

C. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang antara idealitas dan realitas dan antara das sollen dan das sein-nya Karakter berasal dari bahasa Latin "karakter, kharassein, atau kharax", dalam bahasa Prancis "caractere" dalam bahasa Inggris "character". Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lain (Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011: 67). Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber (dikutip Darmaputra, 1988: 3) cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus-menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan "logika dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri,

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok, yaitu nation-building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation-building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur (Darmaputra, 1988: 5). Identitas dan modernitas juga sering kali mengalami tarik-menarik Atas nama identitas sering kali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan.

Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini Soekarno pernah mengatakan: "Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu,

saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan nationale staat., Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin nationale staat.

Di Sulawesi, jang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat. (Dewan Pertimbangan Agung dikutip Darmaputra, 1988: 5).

Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa- bangsa Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahar bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika "ketuhanan" dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini

Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakar bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi.

Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing, maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan fondasi berdirinya negara ini maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa (Kaelan, 2007: 52).

Lima nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, azan magrib, atau suara panggilan dari tempat ibadah agama.

Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental dalam kehidupan bangsa kita, sebagai contoh masyarakat Bali setiap saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa karena terdapat hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya sebagai perwujudan konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab manusia memperoleh kebahagiaan) merupakan cerminan pengamalan sila pertama. Human relationship yang dibangun dari konsep hubungan antarsesama merupakan pencerminan sila kedua.

Dari hubungan yang dibangun antarindividu, kelompok, dan organisasi negara terdapat keberagaman dan penghargaan terhadap pluralisme merupakan cerminan nilai sila ke-3 Pancasila Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya.

D. Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pengembangan Kepribadian

1. makna pendidikan.

Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomer 2 tahun 1989(undang-undang tentang pendidikan nasional) menegaskan bahwa:"pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa yg akan dtg. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional(UU terbaru mengenai sisdiknas RI) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yg harus digunakan dlm mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 nya menegaskan, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yg memartabat dlm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertakwa kepada Tuhan yg maha eda, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warna negara yg demokratis serta bertanggung jawab".

E. Pendidikan Karakter dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan karakter kebangsaan tidak berjalan sendiri. Pemerintah berperan melalui kebijakan, semangat antikorupsi, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Semua ini mencerminkan kepentingan umum demi mendorong masyarakat untuk mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Pendidikan kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter bangsa. Mata kuliah ini tidak hanya membentuk watak pribadi yang baik, tetapi juga karakter kebangsaan yang kuat. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang hubungan warga dengan negara agar mereka menjadi warga negara yang baik dan dapat diandalkan.

Di masa lalu, kecerdasan intelektual (IQ) dianggap faktor utama dalam menentukan keberhasilan seseorang. Namun, kini penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional (EQ) lebih menentukan keberhasilan hidup. Menurut Daniel Goleman (2000), keberhasilan seseorang hanya 20% bergantung pada IQ, sementara 80% bergantung pada EQ. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seharusnya juga memperhatikan aspek EQ dalam membentuk karakter individu.

IQ mengukur potensi seseorang dalam berpikir dan memahami, sementara EQ mengukur kemampuannya dalam mengkoordinasikan perasaan dan tindakan. Orang dengan EQ tinggi memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga lebih mampu mengambil keputusan bijak. Mereka juga cenderung memiliki kepribadian yang kuat dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Faktor yang Mempengaruhi EQ (Daeng Sudirwo, 2001)

1. Lingkungan sosial
2. Keterampilan yang dimiliki

3. Kecakapan dan ketangguhan
4. Kreativitas
5. Nilai, keyakinan, dan hasil pekerjaan

Cara Mengembangkan EQ (Daniel Goleman, 2000)

1. Mengenali diri sendiri agar dapat memperbaiki kelemahan dan memahami kelebihan.
2. Mengembangkan pengendalian diri dalam menghadapi berbagai situasi.
3. Meningkatkan motivasi diri untuk perubahan positif.
4. Peka terhadap orang lain dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.
5. Mengembangkan komunikasi yang baik untuk mempererat hubungan dengan orang lain.

F. Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Nasional

Karakter merupakan sifat dan perilaku khas yang membedakan individu atau bangsa. Beberapa ahli mendefinisikan karakter sebagai berikut:

- Erie Sudewo (2011): Karakter adalah kumpulan sifat baik yang membentuk perilaku sehari-hari dan mencerminkan kesadaran serta amanah.
- Prayitno (2010): Karakter adalah sifat pribadi yang stabil dan menjadi dasar perilaku individu sesuai dengan nilai dan norma.

Kategori Karakter (Erie Sudewo)

1. Karakter Pokok:

Dasar: Jujur, disiplin, tidak egois.

Unggul: Ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggung jawab.

Pemimpin: Adil, bijaksana, komunikatif, inspiratif.

2. Karakter Pilihan:

Berbeda sesuai profesi (guru, pengusaha, pengacara, dll.).

Karakter Kebangsaan dan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk karakter kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila:

- Ketuhanan: Menghormati nilai-nilai agama.
- Kemanusiaan: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- Persatuan: Membangun rasa nasionalisme.
- Musyawarah: Mengutamakan demokrasi.
- Keadilan Sosial: Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Dua Elemen Karakter Kebangsaan:

1. Karakter Pribadi: Membantu individu mandiri dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Karakter Kebangsaan: Memelihara persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

Kesimpulan

Pendidikan karakter harus dilakukan secara sistematis untuk menjaga eksistensi bangsa. Karakter pribadi dan kebangsaan perlu dibangun seimbang agar masyarakat beradab dan negara tetap kuat. EQ yang tinggi akan mendukung individu dalam menjalani kehidupan yang lebih sukses dan harmonis, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, berintegritas, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya. Sebagian besar siswa memiliki persepsi positif terhadap PKn, terutama dalam hal penanaman nilai-nilai moral, etika, nasionalisme, dan demokrasi. Namun, efektivitas pembelajaran PKn masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam metode pengajaran yang kurang interaktif dan cenderung teoritis.

Selain itu, identitas nasional dan pendidikan karakter merupakan elemen penting dalam membangun kesadaran kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter individu dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Pendidikan karakter berbasis PKn membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong, yang menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi PKn, seperti kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, seperti pendekatan berbasis pengalaman dan pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, PKn bukan sekadar mata pelajaran, tetapi juga merupakan sarana strategis dalam membangun karakter dan kesadaran kebangsaan. Dengan penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kehidupan siswa, diharapkan PKn dapat semakin berperan dalam menciptakan generasi muda yang memiliki karakter kuat, berpikir kritis, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri, M. (2022). Pembentukan karakter mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi*, 4(2), 150-162.
- Dewi, R., Suresman, E., & Suabuana, C. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di persekolahan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 2(1), 71–84.
- Jama'ah. (2024). Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar (SD). *Praxis: Jurnal Pendidikan, Budaya, dan Literasi*, 1(2), 1–8.
- Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan: Dalam pembangunan karakter bangsa (Edisi ke-1). PT Rajagrafindo Persada.
- Syahraini, S., Wahid, A., Djasli, H. A., & Wibowo, S. (2006). Membangun karakter dan kepribadian melalui pendidikan kewarganegaraan. *Graha Ilmu*.